

MAMPU KITA KABAR DARI KITA



KABAR DWI BULANAN PROGRAM MAMPU

EDISI KHUSUS 16 HAKTP/ 2019

Konferensi Nasional MAMPU Soroti Kekerasan terhadap Perempuan

MAMPU selenggarakan Konferensi Nasional bertajuk **“Sinergi Multipihak untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Indonesia”** di Jakarta pada 27 November 2019. Konferensi ini bertujuan untuk membangun pemahaman dan komitmen bersama para anggota Legislatif dan Eksekutif periode 2019-2024, untuk mendorong kebijakan dan regulasi yang responsif gender pada setiap sektor pembangunan. Salah satu isu gender yang dihadapi perempuan yang dibahas secara mendalam dalam sesi *break-out* adalah kekerasan terhadap perempuan.

Sesi *break-out* ‘Kekerasan terhadap Perempuan’ menghadirkan enam narasumber dengan latar belakang beragam, yaitu Azriana Manalu (Komnas Perempuan), Edy Wibowo (Mahkamah Agung), Destri Handayani (Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan TPPO/ Kementerian PPPA), Sri Dewi Indajati (DP3AP2KB Jawa Tengah), Veni Siregar (Forum Pengada Layanan) dan Maria Ulfa Anshori (Kongres Ulama Perempuan Indonesia).

Azriana menekankan 3 prinsip *The Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) yaitu **non-diskriminasi, keadilan substantif** dan **kewajiban negara**, yang sesuai dengan landasan Konstitusi Negara Indonesia, yang merujuk pada pentingnya pemajuan, pemenuhan, perlindungan dan penegakan HAM. Pada kenyataannya, walau saat ini telah hadir 290 kebijakan kondusif untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan anak, masih terdapat 381 kebijakan daerah dan 40 kebijakan nasional yang merugikan dan diskriminatif terhadap perempuan.

Menyambung Azriana, Edy Wibowo menjelaskan usaha Mahkamah Agung (MA) dalam menghapus kekerasan terhadap perempuan melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 3 Tahun 2017

tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Edy menginformasikan bahwa PERMA inisiatif MA tersebut fokus pada 3 hal, yaitu pengaturan sikap hakim saat proses persidangan, penjatuhan putusan, serta pemeriksaan uji materiil.

Lima program prioritas Kementerian PPPA tahun 2019 – 2024 disampaikan Destri Handayani, menyangkut peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan, peran perempuan dalam pendidikan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta penurunan angka pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak.

Sri Dewi Indajati dari DP3AP2KB Jawa Tengah menyambung perbincangan dengan menyampaikan pengalaman implementasi inovasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP) di Jawa Tengah.

Sementara itu Veni Siregar dari Forum Pengada Layanan (FPL) berbagi pengalaman lapangan dalam menangani 3.500 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak pada tahun 2017. FPL terdiri dari 115 organisasi yang menangani langsung beragam kasus kekerasan di 32 provinsi di Indonesia. Veni menyinggung proses penanganan kasus yang sering tidak sensitif terhadap kondisi korban, seperti proses BAP dengan pertanyaan menyudutkan korban, korban tidak didampingi orang yang dipercaya, mediasi sepihak oleh polisi, dan menyuruh korban mencari sendiri pelakunya. Selain itu, secara sosial, kasus kekerasan masih sulit diatasi karena masih dianggap urusan privat, menjadi bahan gunjingan dan menimbulkan aib bagi keluarga. Maria Ulfa Anshori dari KUPI menutup perbincangan dengan tiga peran utama tokoh agama dalam penghapusan kekerasan



terhadap perempuan. Pertama, sebagai agen perubahan memberikan edukasi pada masyarakat tentang dimensi kekerasan terhadap perempuan dan mendorong perubahan perilaku umat. Kedua, pendampingan dan pemulihan korban terutama di pesantren, dimana mereka bisa menerima pengaduan kasus dan mendampingi korban hingga kasus selesai. Ketiga, mendorong pembuatan kebijakan (keputusan) agama untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan. KUPI melakukan advokasi kebijakan dengan memberikan pengetahuan keagamaan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan.

Empat rekomendasi dihasilkan dari sesi ini:



Perlunya sosialisasi PERMA No.3 Tahun 2017 di seluruh Indonesia dengan melibatkan lembaga penegak hukum, yaitu Jaksa dan Polisi serta DP3A.



Perlunya mendorong layanan yang komprehensif bagi perempuan korban kekerasan yang melibatkan lembaga terkait dan lintas daerah.



Perlunya melibatkan institusi dan tokoh agama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan karena ulama memiliki potensi sebagai agen perubahan sosial untuk pencegahan secara sistemik.



Harmonisasi regulasi nasional dan daerah karena masih banyak kebijakan yang mendiskriminasi perempuan.

Melalui sesi ini diharapkan berbagai pihak yang hadir dapat saling bertukar pengalaman dan bekerjasama dalam usaha penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Savy Amira Ajak Pelajar Sekolah Dasar Mengenal dan Menghargai Tubuh Sejak Dini

Savy Amira Sahabat Perempuan selenggarakan pelatihan seksualitas di beberapa Sekolah Dasar di Surabaya (25/11) sebagai rangkaian Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan tahun 2019. Tiga SD yang disambangi yaitu SD Bahrul Ulum, SDN Sememi I dan SDN IV Sidotopo. Pelatihan bersama pelajar SD ini bertujuan untuk mencegah sejak dini terjadinya kekerasan seksual. Pelatihan dibuka dengan pengenalan tubuh serta keberagaman bentuk tubuh, termasuk disabilitas, yang bertujuan agar para siswa memahami dan menghargai tubuhnya sendiri dan tubuh orang lain. Selain itu, anak-anak juga dikenalkan dengan berbagai cara menghadapi pelecehan verbal atau *catcalling* di jalan, lengkap dengan contoh dan prakteknya. Para siswa didorong untuk mampu mengatakan "tidak" pada perlakuan yang tidak mereka inginkan. Pelatihan ditutup dengan mengenalkan cara berempati pada korban kekerasan.

Antusiasme tinggi peserta kegiatan terlihat dengan banyaknya pertanyaan yang mereka sampaikan. Beberapa siswa bercerita



pernah menjadi salah satu korban pelecehan verbal seperti penghinaan terhadap orang tua. Siswa yang merasa pernah menghina, langsung meminta maaf saat itu juga.

Selain para siswa SD belajar dari Savy Amira, organisasi pun banyak belajar dari adik-adik SD tentang perkembangan dunia anak-anak terkini.

BaKTI Dukung Lembaga Peradilan untuk Implementasi Pembaruan Batas Usia Perkawinan

Rabu, 4 Desember 2019 bertempat di Pengadilan Tinggi Agama Makasar, Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI), mitra MAMPU yang bergabung dalam Koalisi Stop Perkawinan Anak melaksanakan pelatihan untuk memberikan informasi terkait UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Zusanna Gosal, Deputi Direktur Yayasan BaKTI dalam pidato pembukaan menyoroti panjangnya proses advokasi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU P-KS), yang hingga sekarang belum disahkan. Zusanna menggarisbawahi pentingnya RUU P-KS dalam mencegah dan melindungi korban kekerasan. Oleh karena itu advokasi harus terus dilakukan hingga disahkan menjadi Undang-Undang.

Walau pengesahan RUU P-KS terhambat, ada kemajuan penting di tahun 2019 ini yaitu pengesahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang tersebut menaikkan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan menjadi 19 tahun.

Pelatihan dibuka secara resmi oleh Dr. Hj. Aisyah Ismail, SH., MH. Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Makasar. Dalam sambutannya beliau mengatakan bahwa sejak UU No. 16 Tahun 2019 disahkan, banyak permintaan dispensasi yang telah masuk ke Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, para hakim harus segera mempelajari PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini menempatkan anak sebagai pihak yang mempunyai posisi penting, yang harus didengar pandangannya terkait dengan permohonan dispensasi kawin, bukan orang tua atau keluarganya saja.

Hadir sebagai narasumber pelatihan adalah Theodora Putri (AIPJ2), Dr. Nirwana Pananrang, SH., M.Hum. (Hakim Tinggi dan Anggota Pokja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung) yang membahas tentang PERMA No.5 Tahun 2019, Nur Anti, SE., MT. (Kabid Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sulawesi Selatan) dengan moderator Husaima Husain.

Kegiatan ini merupakan kerjasama Program MAMPU (Kemitraan Australia Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan) dan AIPJ2 (*Australia Indonesia Partnership for Justice*) di Makassar.



Jalan Sehat Keluarga, Rangkul Beragam Pihak untuk Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah



Koalisi gerakan masyarakat sipil di Jawa Tengah, termasuk mitra MAMPU LRC-KJHAM, menggelar kegiatan bertajuk "Jalan Sehat Keluarga" untuk memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16HAKtP) sekaligus Hari Ibu (22 Desember). Kegiatan yang dilaksanakan di *Car Free Day* Simpang Lima Semarang hari Minggu (8/12) dihadiri oleh lebih dari 10 ribu peserta. Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo ikut hadir bersama perwakilan dari PKK, Polda, Pangdam, LSM, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah, serta sejumlah komunitas di Jawa Tengah seperti Semarang Runners

dan komunitas perempuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo membuka rangkaian kegiatan dengan melepas *Semarang Runners* untuk melaksanakan *FUN Run 5 Km*, sebagai bentuk dukungan terhadap penghapusan kekerasan terhadap perempuan. Selain itu, acara juga diisi dengan berbagai orasi dari Ketua TP PKK Provinsi, Ketua PD Bhayangkari, Ketua Dharma Pertiwi, dan aktivis perempuan Fathkurazzi dan Kuriake yang mengajak para peserta untuk mendukung usaha menekan angka kekerasan terhadap perempuan. Rangkaian acara juga dimeriahkan dengan *Flash Mob* tarian untuk mendukung usaha untuk menurunkan angka kekerasan terhadap perempuan.

Acara ditutup dengan penandatanganan komitmen penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Jawa Tengah oleh Pangdam IV, Kapolda, Ketua TP PKK Propinsi, Ketua Bayangkari dan Ketua Dharma Pertiwi.



Mahasiswa Bangun Dukungan untuk Menyelesaikan Kasus-kasus Kekerasan Seksual di Kampus



Dalam rangka 16 HAKtP 2019, Mitra MAMPU Sapa Institute bersama Women Studies Center (WSC) UIN Sunan Gunung Djati menggelar mimbar bebas dan diskusi publik pada 4-5 Desember 2019 di Kampus UIN Sunan Gunung Djati, Bandung. Rangkaian acara ini diselenggarakan dalam rangka membangun dukungan

civitas akademika terhadap penuntasan kasus-kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Dengan sasaran mahasiswa lintas fakultas, acara ini memperkenalkan dan memberikan pemahaman mengenai kasus kekerasan seksual dari sudut pandang pendidikan, penanganan, dan hukum.

Kabupaten Bangli Dukung Penghapusan Kekerasan Seksual



“Hingga saat ini masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Bali. Menurut catatan kami, pada 2018 terjadi 309 kasus, dan meningkat menjadi 571 kasus di tahun 2019,” ujar Ni Luh Putu Nilawati, Direktur LBH Apik Bali, Mitra MAMPU, pada peringatan 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP) di Desa Panglipuran, Bangli, Bali (30/11).

Sejalan dengan semangat HAKtP, Ni Luh Putu Nilawati mengajak pemerintah kabupaten dan segenap lapisan masyarakat di tingkat desa untuk berperan aktif. Saat ini LBH Apik Bali telah mendidik kader dan membentuk satgas pemberdayaan perempuan dan anak di tingkat desa. Selanjutnya LBH Apik berharap seluruh desa dapat mengalokasikan dana desa untuk program pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Bupati Bangli, I Made Gianyar sangat mengapresiasi peringatan yang bertujuan untuk mencegah dan menekan kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. “Untuk itulah sekarang dilaksanakan deklarasi anti kekerasan berikut dukungan untuk pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual. Dengan adanya undang-undang tersebut, komitmen negara menjadi jelas,” ujarnya. I Made Gianyar juga telah menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk bergandengan dengan LBH Apik dalam memberikan pendampingan ke desa-desa.

UI Lawan Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus



Kampus sejatinya adalah tempat untuk belajar dan berkembang, yang aman dari segala bentuk dari kekerasan. Namun kenyataannya, kampus seringkali menjadi tempat terjadinya kekerasan seksual. Keprihatinan inilah yang mendorong BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) dengan dukungan dari MAMPU mengadakan rangkaian kampanye 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan (16 HAKtP)

yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai kekerasan seksual di lingkungan kampus.

Rangkaian kampanye yang diselenggarakan pada 25 November – 6 Desember 2019 ini dibuka dengan peluncuran buku saku “Standar Operasional Penanganan Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Kampus” yang berisi mengenai apa saja yang harus dilakukan jika terjadi kasus kekerasan seksual di lingkungan Kampus UI. Selain itu, BEM FHUI juga mengadakan pameran replika pakaian yang digunakan para korban kekerasan seksual. Pameran ini bertujuan untuk melawan stigma bahwa kekerasan seksual disebabkan oleh pakaian yang digunakan oleh korban. Acara ditutup pada 6 Desember 2019 dengan *talkshow* “Voice of Women” yang mengundang berbagai narasumber perempuan untuk berbagi cerita mengenai perlawanan mereka terhadap berbagai bentuk kekerasan di bidangnya masing-masing.



Angka Kekerasan terhadap Perempuan Masih Tinggi, Nurani Perempuan Sambangi Pemkot Padang

Salah satu mitra MAMPU di Sumatera Barat, Nurani Perempuan Women’s Crisis Center (NPWCC) Padang melakukan audiensi dengan Walikota Padang yang diwakili oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Kota Padang pada 28 November 2019. Perwakilan NPWCC Padang, Rahmi Meri Yenti menyampaikan bahwa audiensi ini dilakukan untuk mendorong pemenuhan hak-hak korban untuk mendapat penanganan,



pemulihan dan ketidakberulangan kekerasan, khususnya untuk korban kekerasan seksual.

Audiensi yang dilakukan dalam rangka 16 HAKtP ini memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota Padang khususnya Dinas P3AP2KB untuk:

- Memiliki program pencegahan dan perlindungan perempuan
- Melahirkan kebijakan untuk percepatan penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan
- Memiliki program kegiatan peningkatan kapasitas dalam penanganan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan

Memprioritaskan anggaran untuk pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban kekerasan khususnya kekerasan seksual.

Audiensi ini sangat penting mengingat tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Sumatera Barat, khususnya di Kota Padang. Sebanyak 75 kasus tahun 2017 yang terjadi di Kota Padang dari 132 kasus di Sumatera Barat, meningkat menjadi 116 dari 154 kasus tahun 2018. Sedangkan sepanjang tahun 2019, hingga bulan Oktober, tercatat 61 kasus di Kota Padang.

Dunia (Masih Belum) Tanpa Kekerasan bagi Perempuan Penyandang Disabilitas

"Tidak sedikit Perempuan dengan disabilitas korban kekerasan yang tidak mendapatkan pelayanan dan pendampingan hukum yang adil. Hal ini memungkinkan pelaku berpotensi mengulangi tindakannya sehingga Perempuan dengan disabilitas menjadi korban kekerasan berulang kali," ujar Ibnu Sukoco, Direktur *Center for Improving Qualified Activity in Live of People with Disabilities* (CIQAL), yang merupakan Forum Pengada Layanan jaringan Mitra Program MAMPU di Yogyakarta. Pernyataan ini disampaikan Sukoco pada acara peringatan Kampanye 16 HAKtP 2019 bertajuk "Penghapusan Kekerasan Seksual dan Perlindungan Bagi Perempuan Pembela HAM" di Aula Joglo ATEKPI Bantul, Yogyakarta (29/11) yang diikuti oleh ribuan peserta dari Yogyakarta dan sekitarnya.

Berdasarkan data yang dikumpulkan CIQAL sejak Januari 2014 hingga November 2019, terdapat 144 kasus kekerasan terhadap perempuan penyandang disabilitas dilaporkan di Yogyakarta. Dari 144 kasus tersebut, 102 diantaranya merupakan kekerasan seksual, 36 kasus KDRT, dan 6 kasus kekerasan terhadap anak.

Menurut Ibnu, angka tersebut baru mencerminkan kasus yang dilaporkan, belum menyatakan kasus yang ditutupi, misalnya karena menerima tawaran perdamaian dari pihak pelaku. "Biasanya keluarga korban menerima tawaran tersebut karena kurangnya dukungan dan kepedulian masyarakat, pemerintah, dan aparat penegak hukum. Terlebih lagi, sulit mengakses bantuan



hukum dan layanan pemerintah bagi penyandang disabilitas yang mengalami kasus kekerasan."

"Selain bantuan hukum, perempuan difabel yang menjadi korban kekerasan seharusnya mendapatkan bantuan medis, psikologis dan ekonomi. Namun sejauh ini, hanya 14 kasus yang diproses hukum dan pelakunya dijatuhi hukuman," jelas Ibnu. Dengan kenyataan tersebut, Ibnu menyampaikan harapan CIQAL kepada Pemerintah agar ada payung hukum yang lebih menyeluruh dalam memberikan keadilan bagi para korban kekerasan tanpa memandang latar belakang dan kondisi non/disabilitasnya, dan mewujudkan dunia tanpa kekerasan bagi semua orang.

Gereja dan Sekolah di Ambon Kampanyekan Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan bersama Yayasan GASIRA



Di Puncak Perayaan 16HAKtP dalam rangka memperingati hari HAM, Yayasan GASIRA Maluku meresmikan Pusat Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Klasis Lease, Gereja Protestan Maluku (GPM) Kepulauan Lease, Maluku Utara (10/12). Terbentuknya pusat layanan dan pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan hasil advokasi yang dilakukan sejak tahun 2017, melalui dukungan Program MAMPU dalam upaya menghapus kekerasan terhadap perempuan.

Pusat Layanan dan Pemberdayaan Masyarakat Klasis Lease memiliki sejumlah layanan terintegrasi, diantaranya: Pusat Layanan Kekerasan Perempuan dan Anak "Ina Marta", Walang Kreatif Pendidikan Formal Gereja, Walang Inovasi Lingkungan dan Walang Pemberdayaan Pemuda.

GASIRA juga bekerja sama dengan sejumlah sekolah menengah pertama di Kota Ambon dalam menggelar kampanye 16HAKtP melalui kegiatan Lomba Majalah Dinding dengan tema “Kekerasan Seksual terhadap Anak”, pada 5 Desember 2019, di Aula Pertemuan SMP Negeri 6 Ambon. Kegiatan ini diikuti 5 sekolah, yakni SMP Negeri 2, SMP Negeri 6, SMP Negeri 19, SMP Muhammadiyah dan SMP Xaverius di Kota Ambon. Melalui kegiatan tersebut, para siswa belajar dengan dampingan guru dan GASIRA tentang pentingnya meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan terhadap kekerasan seksual, khususnya terhadap anak.

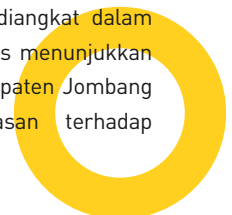


WCC Jombang Ajak Sekolah Melawan Kekerasan Seksual Sejak Dini



Dari Oktober 2016 hingga Oktober 2019 WCC Jombang mencatat 266 perempuan korban kasus kekerasan di Kabupaten Jombang, di mana 65% diantaranya merupakan kekerasan seksual pada anak perempuan usia sekolah. Menanggapi hal tersebut, WCC Jombang menyelenggarakan kampanye bertema “Jombang Melawan Kekerasan Seksual” di tiga sekolah yaitu, SMPN 1 Peterongan, SDN 1 Mancar dan SDN 1 Kepuhkembang (30/11). Kegiatan tersebut

ditujukan langsung kepada siswa, dengan pengawasan guru mereka, untuk meningkatkan pemahaman dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak. Tema yang diangkat dalam rangka memperingati 16HAKtP tahun ini sekaligus menunjukkan ajakan langsung bagi institusi pendidikan di Kabupaten Jombang untuk turut berkomitmen melawan kekerasan terhadap perempuan dan anak.



Tentang MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

MAMPU adalah program inisiatif bersama antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Indonesia. Program ini mendukung Pemerintah Indonesia dalam mencapai Target Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dengan membangun kepemimpinan dan pemberdayaan perempuan, sehingga akses perempuan terhadap pelayanan dasar dan program pemerintah meningkat.

Edisi Khusus
16 HAKtP

Informasi Lebih Lanjut:
Website: www.mampu.or.id
Twitter : @ProgramMAMPU
Email : info@mampu.or.id

MAMPU

Kemitraan Australia - Indonesia
untuk Kesetaraan Gender
dan Pemberdayaan Perempuan